

## Pengaruh IPM dan UMK Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Tengah

**Firda Armaatus Solicha**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [firda.21004@mhs.unesa.ac.id](mailto:firda.21004@mhs.unesa.ac.id)

**Indah Dwi Agustin**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [indah.21052@mhs.unesa.ac.id](mailto:indah.21052@mhs.unesa.ac.id)

**Silvie Putri Wahyu Efendi**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [silvie.21006@mhs.unesa.ac.id](mailto:silvie.21006@mhs.unesa.ac.id)

**Kukuh Arisetyawan**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [kukuharisetyawan@unesa.ac.id](mailto:kukuharisetyawan@unesa.ac.id)

**Aprillia Nilasari**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [aprillianilasari@unesa.ac.id](mailto:aprillianilasari@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting bagi dinamika ekonomi suatu wilayah, karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan menghambat pembangunan daerah. Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menetapkan upah minimum. Penelitian ini menggunakan data BPS dan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, namun IPM berpengaruh signifikan.*  
**Kata Kunci :** *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota.*

### Abstract

*The labour force participation rate is a crucial indicator of a region's economic dynamics, since an imbalance between labour force growth and job creation can result in elevated unemployment and hinder regional development. The government attempts to increase labor force participation by improving the quality of human resources and setting the minimum wage. This study uses BPS data and panel data regression analysis to determine the effect of the Human Development Index (HDI) and MSE (District/City Minimum Wage) on the labor force participation rate in Central Java. The findings of this study show that MSEs have no significant impact on labor force participation in Central Java Province, but HDI has a significant impact.*

**Keywords:** *Labor Force Participation Rate, Human Development Index, Regency/City Minimum Wage*

**How to cite:** Solicha, F. A, Agustin, I. D, & Efendi, S. P. W, et al (2024). Pengaruh IPM dan UMK Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Tengah. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 4(3), 60-67.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang saat ini menghadapi berbagai masalah terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Pertambahan penduduk yang cepat tidak hanya meningkatkan jumlah pekerja, tetapi juga membutuhkan jumlah lapangan pekerjaan agar angkatan kerja dapat terserap dengan optimal. Kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan pendapatan. Tingkat partisipasi tenaga kerja merupakan salah satu metrik untuk menilai kemajuan ekonomi daerah. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 36 juta jiwa pada tahun 2023, Jawa Tengah memiliki hambatan yang signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Peningkatan kesempatan kerja sangat penting dilakukan untuk menyeimbangkan peningkatan populasi usia kerja. Perbandingan yang tidaksesuaian antara banyaknya angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerjadapat mengakibatkan beberapa masalah seperti, meningkatnya pengangguran yang mana dapat mengurangi efisiensi sumber daya, meningkatnya beban sosial, kemiskinan, dan keresahan masyarakat, serta menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023 Jawa Tengah menempati urutan ketiga tertinggi dalam jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, setelah Jawa Barat dan Banten, dengan 9.435 pekerja terkena dampak. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, total pekerja yang mengalami PHK pada tahun 2023 mencapai 63.806 orang, meningkat 154,07% dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 25.114 orang. Tingginya angka PHK ini menyoroti tantangan besar dalam menjaga kestabilan ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menetapkan upah minimum. Langkah ini sejalan dengan teori upah efisiensi yang dikemukakan oleh Gregory Mankiw, yang menjelaskan hubungan antara tingkat upah dan produktivitas pekerja. Dalam teori ini, upah yang memadai berperan penting dalam menjaga produktivitas pekerja, karena penurunan upah justru dapat berdampak negatif pada kinerja tenaga kerja dan laba perusahaan. Upah juga berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, seperti sandang, pangan, dan papan, yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja.

Selain itu, konsep *Human Capital* yang dikemukakan oleh Frank dan Bernanke menegaskan bahwa pendidikan, pengalaman, pelatihan keterampilan, kebiasaan, kesehatan, dan inisiatif sangat mempengaruhi produktivitas individu. Peningkatan *Human Capital* tidak hanya berkontribusi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga secara langsung memperkuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dengan investasi yang tepat dalam *Human Capital*, tenaga kerja menjadi lebih kompeten dan responsif terhadap tantangan ekonomi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Pramono & Firdayetti (2020) menyatakan bahwa peningkatan IPM berhubungan positif dengan partisipasi angkatan kerja, di mana lokasi-lokasi

dengan IPM yang lebih tinggi memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penelitian Herman (2023) menemukan bahwa UMR yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak orang ke pasar tenaga kerja, hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja. Sementara itu, penelitian oleh Amaliyah & Arif (2023) menunjukkan bahwa, meskipun fokus utamanya adalah pada ketidaksetaraan distribusi pendapatan, UMK dapat berdampak pada daya tarik pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja. Hasilnya, ada hubungan yang cukup besar antara UMK dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kebijakan yang meningkatkan UMK dapat menjadi teknik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Penelitian Pramono & Soesilowati (2018) jika belanja pemerintah di sektor pendidikan serta kesehatan berkorelasi dengan peningkatan IPM, yang dapat meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi kerja angkatan kerja, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan UMK, tetapi juga pada pengembangan program-program yang meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, analisis terhadap pengaruh IPM dan UMK terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan memiliki dampak signifikan terhadap dinamika pasar tenaga kerja.

Penelitian ini penting agar dapat melihat pengaruh IPM dan UMK terhadap TPAK Jawa Tengah. Dengan latar belakang IPM yang terus meningkat dan kebijakan UMK yang secara konsisten diperbarui, ada kebutuhan untuk mengkaji apakah kedua faktor tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan angkatan kerja, atau sebaliknya, memicu tantangan baru seperti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dengan menggunakan data empiris dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah, studi ini akan melihat hubungan antara variabel-variabel tersebut agar dapat mengambil langkah kebijakan yang lebih baik mengenai pola ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Temuan-temuan dari studi ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mengembangkan langkah-langkah yang lebih sesuai dalam merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendorong peningkatan angkatan kerja melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan kebijakan upah yang lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia yang dikumpulkan antara tahun 2019 dan 2023. Variabel independen pertama (X1) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variabel kedua adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dan variabel dependen adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data untuk penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik regresi panel. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel independen (X1 dan X2) mempengaruhi variabel dependen. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Variabel IPM

$\beta_2$  = Koefisien Variabel UMK

X1 = Variabel IPM

X2 = Variabel UMK

i dan t = Komponen *Cross Section* (Provinsi i) Dan *Time Series* (Tahun t)

e = Variabel Pengganggu (*Error Term*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang secara aktif terlibat dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam persentase. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah tingkat kompensasi terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya, dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Semua data untuk penelitian ini diambil dari publikasi online Badan Pusat Statistik (BPS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh IPM dan UMK terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 diukur melalui uji regresi data panel. Berdasarkan hasil uji melalui bantuan aplikasi EViews 12, maka diperoleh hasil berikut:

$$Y = -41.2847773326 + 0.0171509366265*IPM - 0.00938098381457*UMK$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta menunjukkan sebesar -41,2 yang berarti tanpa adanya variabel IPM, UMK dan TPAK akan mengalami penurunan 41,2%.
- Variabel IPM (X1) mempunyai koefisien beta sebesar 0,017, yang menunjukkan bahwa jika variabel X1 meningkat sebanyak 1,7% sementara variabel lainnya tetap tidak berubah, maka variabel TPAK (Y) juga akan meningkat sebanyak 1,7%. Di sisi lain, jika variabel X1 turun sebesar 1%, tanpa adanya perubahan pada variabel lain, maka variabel Y juga akan mengalami penurunan sebesar 1%.
- Variabel UMK (X2) mempunyai koefisien beta sebesar -0,009 yang menunjukkan bahwa jika nilai variabel lainnya tetap dan variabel X2 turun sebesar 0,9% maka variabel TPAK (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,9%. Di sisi lain, jika variabel X2 naik sebesar 1% sementara nilai variabel lain tetap, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1%.

## Hasil Estimasi Model

Berikut adalah hasil uji data dengan bantuan software Eviews 12

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Keterangan	Koefisien	t-test	Prob.
C	-41.28478	-0.712670	0.4774
IPM	0.017151	3.221042	0.0016
UMK	-0.009381	-0.154881	0.8772
Obs	175		
R <sup>2</sup>	0.690296		
R <sup>2</sup> adjusted	0.600381		
F-statistic	7.677274		
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah (2024)

Berikut adalah hasil uji data yang dilakukan untuk menentukan korelasi antara variabel X dan Y:

- Hasil pengujian t statistik atau secara parsial variabel IPM (X1) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.22104 > t tabel yakni 1,973771337 dan nilai signifikansinya sebesar 0,0016 < 0,05, maka bisa diartikan variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y)
- Hasil pengujian t statistik atau secara parsial variabel UMK (X2) menunjukkan t hitung sebesar -0,15488 < t tabel yakni 1,973771337 dan nilai signifikansinya sebesar 0,8772 > 0,05, oleh karena itu, bisa disimpulkan variabel UMK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y)
- Hasil uji F (simultan) menunjukkan Nilai F hitung yang terjadi adalah 7.677274 > F tabel yaitu 3.294537 dan nilai signifikansi 0.000000 < 0.05, yang berarti bahwa variabel IPM dan UMK berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja di Jawa Tengah
- Nilai adjusted R-square sebesar 0,690296 atau 69% menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk menjelaskan 69% dari variabel tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini memberikan probabilitas sebesar 31% bahwa variabel lain dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah.

### **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Analisis data membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dan memiliki nilai koefisien 3.221042. Artinya, peningkatan indeks pembangunan manusia akan diikuti oleh peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Semakin berkualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Begitupun sebaliknya

jika IPM yang dimiliki rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Sesuai dengan teori Frank dan Bernanke yang menggarisbawahi bahwa dampak besar dari pendidikan, pengalaman, pelatihan keterampilan, kebiasaan, kesehatan, dan inisiatif terhadap produktivitas individu. Meningkatkan Modal Manusia tidak hanya berkontribusi pada Indeks Pembangunan Manusia, tetapi juga secara langsung memperkuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya oleh Randa & Fani (2023) dengan fokus penelitian di Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Asmara & Wahed (2024). Dengan hasil temuan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dengan objek penelitian Kabupaten Sampang dan penelitian Wasono et al. (2020) dengan objek penelitian berada di Provinsi Jambi.

#### **Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Berdasarkan analisis pengolahan data menunjukkan variabel UMK memiliki koefisien  $-0.154881$  dengan tingkat signifikansi  $0,8772$  yang dapat diartikan bahwa variabel UMK tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat partisipasi pekerja. Hal ini kemungkinan dikarenakan semakin tinggi tingkat upah yang dimiliki suatu perusahaan semakin sedikit tingkat partisipasi angkatan kerja sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan maka jumlah tenaga kerja akan berkurang (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Selain itu, hal ini juga digambarkan dengan teori upah efisiensi dari Gregory Mankiw, yang menjelaskan korelasi positif antara tingkat upah dan produktivitas pekerja, dan pengurangan upah dapat berdampak buruk pada kinerja tenaga kerja dan profitabilitas perusahaan.

Temuan dari penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Wasono et al., (2020) dengan objek penelitian berada di Provinsi Jambi dan Sarsi et al., (2014) dengan objek penelitian di Provinsi Riau yang menyatakan tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi secara negatif oleh upah minimum dan atau tidak berpengaruh signifikan. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Bonerri K.B. et al., (2018) dengan fokus penelitian berada di Kota Manado dan penelitian yang dilakukan oleh Haspa et al., (2023) dengan fokus penelitian berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitiannya menemukan bahwa upah minimum regional justru meningkatkan tingkat partisipasi dalam angkatan kerja.

#### **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Berdasarkan analisis pengolahan data menunjukkan variabel IPM dan UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah dan memiliki nilai koefisien  $7.677274$  lebih besar dari F tabel yaitu  $3.294537$  dan memiliki nilai signifikansi  $0.000000 < 0.05$ . Yang dapat

diartikan ketika indeks pembangunan manusia dan tingkat upah mengalami kenaikan maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan teori yang disuarakan oleh Frank dan Brenanke bahwa kualitas seorang individu mendukung tingkat produktivitas seseorang seperti halnya sedang bekerja, selain itu juga terdapat teori Gregory Mankiw bahwa upah menurunkan kinerja dan produktivitas perusahaan begitupun sebaliknya. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wasono et al. (2020) dengan hasil variabel upah minimum, kemiskinan dan IPM berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi.

## KESIMPULAN

Variabel bebas indeks pembangunan manusia secara individu berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya, variabel bebas upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Namun, variabel independen secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil analisis regresi data panel untuk mengamati hubungan pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, sesuai dengan hasil pengujian dengan bantuan *software eviews*.

Untuk mencapai stabilitas tingkat partisipasi angkatan kerja, pemerintah perlu mengkaji berbagai kebijakan dan program inovasi yang bisa mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi lebih baik. Selain itu saran untuk penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model dan melakukan perluasan objek dan tahun penelitian.

## REFERENSI

- Amaliyah, S., & Arif, M. (2023). Analisis Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i2.1811>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia menurut Jenis Kelamin 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYyIzI=/human-development-index--hdi--by-gender.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2022-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics->
- Bonerri K.B., Walewangko E.N., & Tumangkeng S.Y.L. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 34–45.
- Depnakertrans. (2024). *Tenaga Kerja ter-PHK, Agustus Tahun 2024*.

- Depnakertrans. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1921>
- Herman, H. (2023). Pengaruh UMR, jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Pekanbaru. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 11(1), 54. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v11i1.14916>
- Pendidikan, A. P., Dan, T. U., Haspa, N. H., & Mataram, U. (2023). *EKONOBIS*. 9(1), 1–13.
- Penggunaan, E., Produksi, F., Cabai, U., Sumowono, K., & Semarang, K. (2013). *Economics Development Analysis Journal*. 2(4), 446–455.
- Pramono, K. D., & Firdayetti. (2020). Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 819–832. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14436>
- Pramono & Soesilowati (2024). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan Dan Indeks*. 14(01), 59–64.
- Randa, F., & Fani, L. A. (2023). Pengaruh Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Implikasi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 1405–1408. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.755>
- Sarsi, W., Putro, T. S., & Sari, L. (2014). Pengaruh Tingkat Upah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau. *Jom Fekon*, 1(2), 1–15.
- Wasono, F. K., Erfit, E., & Achmad, E. (2020). Analisis pengaruh upah minimum provinsi, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 63–76. <https://doi.org/10.22437/pdpp.v9i2.8688>
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96. <https://doi.org/10.22146/jgs.34054>